

▶ AKSI KORPORASI

Jalan Terjal IPO Anak BUMN

Menyandang status sebagai entitas anak perseroan pelat merah, tidak serta-merta membuat eksekusi penawaran umum perdana saham atau *initial public offering* (IPO) sejumlah perseroan berjalan mulus. Harga pencatatan perdana kerap berada di batas kiri dan pergerakan harga cenderung terkoreksi dari level harga IPO.

M. Nurhadi Pratomo
nurhadi.pratomo@bisnis.com

Pada Senin (28/5), Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali kedatangan emiten anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. menjadi entitas anak pelat merah kedua yang mencatatkan sahamnya pada tahun ini setelah PT Bank BRI Syariah Tbk. (BRIS).

Emiten yang mendapatkan kode saham TUGU itu resmi melantai perdana di BEI dengan melampaui 177,78 juta unit saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Anak usaha PT Pertamina (Persero) itu membanderol harga saham perdana di level Rp3.850 per saham.

Namun, harga saham TUGU tercatat langsung terkoreksi usai bel tanda pembukaan perdagangan ditekan. Menurut data *Bloomberg*, saham TUGU bergerak di zona merah sepanjang perdagangan perdana dan akhirnya mendarat turun 250 poin atau 6,49% ke level Rp3.600 pada sesi penutupan, Senin (28/5).

Sebaliknya, harga saham BRIS langsung tancap gas naik 19,61% ke level Rp610 usai pencatat-

an saham perdana pada, Rabu (9/5). Sepanjang sesi perdagangan perdananya, pergerakan berada di zona hijau dan mendarat dengan penguatan 6,86% atau 35 poin ke level Rp545 saat sesi penutupan perdagangan.

Seperti diketahui, emiten berkode saham BRIS itu membanderol harga saham IPO di level Rp505 atau mendekati batas kiri harga penawaran Rp505—Rp650 per saham.

Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami oleh TUGU yang melepas saham pada harga Rp3.850 atau batas kiri dari kisaran harga penawaran Rp3.850-Rp5.000 per saham.

Manajemen Asuransi Tugu Pratama Indonesia menanggapi dingin pergerakan harga saham perseroan yang terkoreksi pasca-pencatatan perdana di BEI.

"Kami *enggak* khawatir karena yakin fundamental perseroan baik," ujar Presiden Direktur Asuransi Tugu Pratama Indonesia Indra Baruna.

Indra menilai pergerakan saham yang langsung terkoreksi akibat mekanisme pasar. Kendati demikian, pihaknya optimistis kinerja bakal membaik karena perseroan memiliki catatan yang solid untuk urusan fundamental.

"Dengan berjalannya waktu, kami bisa buktikan lebih ke masyarakat dan investor," imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa dana Rp684 miliar yang dihimpun perseroan akan digunakan sebanyak 70% untuk pengembangan bisnis termasuk penguatan infrastruktur produk-produk ritel. Sisanya atau sebesar 30% untuk peningkatan modal anak usaha yakni PT Tugu

Harga Saham Emiten Anak BumN*		
Ticker	Harga (Rp/saham)	Kinerja Ytd (%)
WSBP	404	▼ 0,98
WTON	458	▼ 8,4
PPRO	171	▼ 9,52
PPRE	426	▲ 2,4
ELSA	418	▲ 12,37
WEGE	228	▼ 16,18
GMFI	306	▼ 3,77
IPCM	430	▼ 0,92
BRIS	635	▲ 14,41
TUGU	3.600	▼ 6,49

Keterangan: *) per 28 Mei 2018
Sumber: Bloomberg

Reasuransi Indonesia (TuguRe).

IPO IKT

Entitas anak BUMN lain, PT Indonesia Kendaraan Terminal akan menawarkan sebanyak-banyaknya 561,1 juta saham melalui IPO. Anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) itu membanderol harga penawaran saham IPO di level Rp1.610-Rp2.250 per saham.

Dengan demikian, IKT mengincar dana hasil IPO sebesar Rp903,3 miliar hingga Rp1,26 triliun.

Direktur Utama Indonesia Kendaraan Terminal Chiefy Adi Kusmargo mengungkapkan rencana penawaran awal atau *bookbuilding* akan dilakukan pada 28 Mei 2018-22 Juni 2018. Pihaknya berharap dapat melakukan pencatatan atau *listing* perdana di BEI pada 10 Juli 2018.

Alfred Nainggolan, Kepala Riset Koneksi Capital, menilai penurunan harga saham TUGU pasca pencatatan perdana akibat peminat saham asuransi yang minim di pasar sekunder. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan BRIS.

Dia menyebut beberapa emiten asuransi yang telah melantai di BEI sebelumnya juga memiliki kinerja saham yang kurang baik. Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak begitu optimistis dengan saham dari sektor tersebut.

Alfred menjelaskan bahwa latar belakang emiten dan karakteristik industri sangat memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Hal tersebut akan memengaruhi perdagangan saham perseroan di

pasar sekunder.

Di sisi lain, pihaknya menilai pembentukan harga IPO sangat erat kaitannya dengan mekanisme pasar. Akan tetapi, batas harga bawah yang dipasang biasanya telah memenuhi perhitungan minimal target dana yang akan dihimpun.

"Selama harga masih di dalam rentang yang ditawarkan berarti masih sesuai rencana. Sementara, investor kalau bisa pasti maunya di batas kiri," jelasnya.

Alfred memproyeksikan investor akan tetap melirik calon emiten selama memiliki kinerja fundamental yang kuat dan karakteristik industri yang menarik. Apalagi, perseroan yang tidak memiliki pesaing seperti Indonesia Kendaraan Terminal.

"Kalau ternyata memang industri-nya menarik tidak perlu takut untuk mengeksekusi rencana IPO," jelasnya. Dia mencontohkan anak BUMN yang menunda eksekusi IPO, PT Wijaya Karya Realty. Menurut dia, selain kondisi pasar, hal tersebut akibat sentimen terhadap industri yang masih belum cukup baik.

Seperti diketahui, Wijaya Karya Realty menunda eksekusi rencana penawaran umum perdana saham yang dijadwalkan akan berlangsung pada Mei 2018. Manajemen perseroan menyebut penundaan dilakukan akibat kondisi pasar modal yang dinilai masih kurang kondusif.

Sementara itu, Head of Equity Trading Phintraco Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetyo menilai saat ini kondisi yang kurang tepat untuk mengeksekusi IPO. Pasalnya, investor lebih memilih menyimpan dananya dibandingkan dengan membeli aset.

Menurut Frankie, kebanyakan investor cenderung memilih untuk memilih saham induk BUMN. Kondisi tersebut akibat beberapa di antaranya telah mengalami koreksi cukup dalam sehingga memiliki valuasi murah.

"Prospek untuk IPO dengan kondisi *market* yang sedang gonjang ganjing seperti ini agaknya kurang baik. Ketika *market* sedang mengalami volatilitas, investor cenderung lebih memilih saham BUMN yang sudah *listing* dan memiliki harga terdiskon, seperti TLKM, BBRI, dan BMRI," paparnya.

▶ EMITEN PERTANIAN

BISI Incar Pendapatan Rp2,7 Triliun

JAKARTA — Produsen benih, PT BISI International Tbk. membidik kenaikan pendapatan bersih sebesar 20% dari Rp2,31 triliun pada tahun lalu menjadi Rp2,77 triliun pada 2018.

Direktur Utama BISI International Jemmy Eka Putra mengungkapkan sejumlah varietas yang diproduksi perseroan membukukan permintaan yang cukup tinggi.

"Tahun ini kami menargetkan penjualan dapat naik 20%, juga karena ada kontribusi penjualan dari perusahaan yang kami akuisisi tahun lalu. Potensi pasar masih besar, apalagi kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan sektor pertanian," ungkap Jemmy, Senin (28/5).

Jemmy menjelaskan tingkat pertumbuhan tersebut sama dengan target pada tahun lalu. Emiten berkode saham BISI ini optimistis target tersebut dapat dicapai karena potensi pasar benih jagung dan hortikultura dalam negeri masih cukup besar, serta kebijakan pemerintah mendukung industri benih lokal.

Pada kuartal III/2018, BISI berencana meluncurkan varietas baru, yaitu BISI 220. Varietas baru itu diandalkan perseroan untuk memacu penjualan benih jagung pada tahun ini.

Selain itu, imbuhan Jemmy, perseroan akan mengkonsolidasikan penjualan PT Branita Sandhini yang diakuisisi pada 2017. Sebelum diakuisisi BISI, perusahaan tersebut merupakan entitas usaha Grup Monsanto yang memproduksi benih tanaman.

Dengan akuisisi tersebut, BISI memperoleh pabrik baru dengan kapasitas 13.500 ton per tahun.

"Transaksi akuisisi tersebut telah selesai pada Desember 2017. Tahun ini kami akan memasarkan langsung empat produk perusahaan tersebut dengan merek BISI. Kontribusi penjualan Branita Sandini terhadap total penjualan BISI tahun ini sebesar 6%, dan akan menjadi 11% pada 2019," ungkap Jemmy.

Berdasarkan data perseroan, 55% pendapatan entitas anak PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk. tersebut disumbangkan oleh lini benih jagung hibrida, disusul lini pestisida sebesar 37%-38%, sedangkan sisanya disumbangkan oleh penjualan benih sayuran.

Jemmy menyampaikan perseroan pada tahun ini akan menganggarkan belanja modal sebesar Rp105 miliar yang sumber dananya berasal dari kas internal perusahaan.

Sekitar 75% dari dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan jumlah lahan guna kepentingan riset, dan untuk memproduksi benih induk. Adapun, 10% dana belanja modal pada 2018 akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. (Dara Azillya)



PT. MAYORA INDAH Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) ("Rapat")

Dengan ini diberitahukan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mayora Indah Tbk. telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Hotel Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci, Tangerang, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja	Direktur Utama : Andre Sukendra Atmadja
Komisaris : Hermawan Lesmana	Direktur : Hendarta Atmadja
Komisaris : Gunawan Atmadja	Direktur : Wardhana Atmadja
	Direktur : Hendrik Polisar
	Direktur : Muljono Nurilimo

II. Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dimulai pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 WIB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 20.516.423.337 (Dua puluh milyar Lima ratus enam belas juta Empat ratus dua puluh tiga ribu Tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau 91,76% (Sembilan puluh satu koma Tujuh puluh enam persen) dari total 22.358.699.725 (Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi Agenda Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

V. Keputusan RUPS

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (duaribu tujuh belas).

Hasil Pemungutan Suara	Setuju (100%)	Abstain (00,00%)	Tidak Setuju (00,00%)
	20.516.423.337	206.500	1.345.700

Keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dengan demikian, memberikan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2017.

2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2017 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku

Hasil Pemungutan Suara	Setuju (99,99%)	Abstain (00,00%)	Tidak Setuju (0,01%)
	20.515.077.637	00	1.345.700

Keputusan:

Menyetujui Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2017 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2017, adalah sebagai berikut :
Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah sebesar Rp. 1.630.953.830.893,- (Satu triliun Enam ratus tiga puluh milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta Delapan ratus tiga puluh ribu Delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) Kami usulkan digunakan untuk :

- Dana Cadangan, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah)
- Dividen tunai, sebesar Rp. 603.684.892.575,- (Enam ratus tiga milyar Enam ratus delapan puluh empat juta Delapan ratus sembilan puluh dua ribu Lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp.27,- (Dua puluh tujuh Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 22.358.699.725 (Dua puluh dua milyar Tiga ratus lima puluh

delapan juta Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu Tujuh ratus dua puluh lima) saham

- Sisanya sebesar Rp. 1.025.268.938.318 (Satu triliun Dua puluh lima milyar Dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Tiga ratus delapan belas Rupiah) dimasukkan sebagai Laba yang Ditahan.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan pelaksanaannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda Penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju (97,13%)	Abstain (0,00%)	Tidak Setuju (2,87%)
	19.927.636.392	206.500	588.786.975

Keputusan:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Ahmad Syakir dari dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Senni Idris, untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terjadi suatu kondisi karena alasan apa pun juga, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit

4. Mata Acara ke-4:

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju (99,97%)	Abstain (0,00%)	Tidak Setuju (0,03%)
	20.509.822.937	0	6.600.400

Keputusan:

Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan dan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5:

Pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju (92,73%)	Abstain (7,27%)	Tidak Setuju (0,00%)
	20.516.423.337	1.491.319.962	0,00

Keputusan:

- memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Bapak Ramli Setiawan, dan mengangkat Bapak Anton Hartono selaku Komisaris Independen Perseroan.

- Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya.

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sbb :

- Bapak Jogi Hendra Atmadja, selaku Komisaris Utama
- Bapak Hermawan Lesmana, selaku anggota Komisaris
- Bapak Gunawan Atmadja, selaku anggota Komisaris
- Bapak Suryanto Gunawan, selaku Komisaris Independen
- Bapak Anton Hartono, selaku Komisaris Independen
Untuk masa jabatan hingga ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2023.

6. Mata Acara ke-6:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan :

- Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap", sebesar Rp.750.000.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan
- Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012" sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sampai tanggal 31 Desember 2017, masih terdapat sisa dana yang belum digunakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar Rupiah) yang berasal dari "Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012".

Sisa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. OCBC NISP Tbk, sebesar bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, dengan periode penempatan bulanan.

Sementara Sukuk Mudharabah II tahun 2012 telah dilunasi saat jatuh tempo, yaitu pada bulan Mei 2017.

- Pada bulan Februari 2017, Perseroan melakukan "Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I tahun 2017", dengan jumlah Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus miliar Rupiah).

Pada tanggal 31 Desember 2017, dana tersebut telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang disampaikan melalui prospektus, yaitu untuk pelunasan "Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012" dan untuk Modal Kerja Perseroan.

- Pada bulan Desember tahun 2017, Perseroan melakukan "Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II tahun 2017", dengan jumlah Rp. 550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh miliar Rupiah).

Pada tanggal 31 Desember 2017, masih terdapat sisa dana yang belum digunakan sebesar Rp. 495.397.000.000 (Empat ratus sembilan puluh lima milyar Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk rekening koran dan rekening deposito pada bank bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu bank Mandiri, bank CIMB Niaga, bank OCBC dan Maybank.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan ketentuan sbb :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 05 Juni 2018
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 06 Juni 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 08 Juni 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 20 Juni 2018
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 08 Juni 2018
- Awal Pembayaran Dividen Tunai : 25 Juni 2018

3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).

4. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warakat atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan melalui Dept. Corporate Secretary Perseroan, pada alamat : Gedung Mayora Group lantai 4, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta, telp. 021 806 37400, email : corporatesecretary@mayora.co.id setiap hari kerja, jam 9.00 s/d 15.00 WIB. Dengan membawa :

- Asli Bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport) beserta foto copynya.
- Surat Kuasa, apabila diwakilkan, berikut jati diri Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Foto Copy Angaran Dasar, bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

5. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10, Jakarta, paling lambat tanggal 08 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 08 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Kantor Biro Administrasi Efek tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.

b. Pemegang Saham yang merupakan warga atau badan hukum negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penyerahan persyaratan untuk maksud tersebut, untuk Pemegang Saham di Luar Penitipan Kolektif dilakukan selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2018, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif adalah sesuai ketentuan KSEI.

Demikian pengumuman ini agar diketahui dan diyakini.

Jakarta, 30 Mei 2018
PT. MAYORA INDAH Tbk
Direksi